

Administrasi Pembangunan Desa dan Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Lokal dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Kabupaten Majalengka)

Village Development Administration and Strengthening Local Human Resource Competencies in Village Fund Management (A Case Study in Majalengka Regency)

Siti Khumayah¹, Leni Rohida², Siti Adira Kania³, dan Nisrina Nur Alfi Laili⁴

^{1,2,3,4} Universitas Swadaya Gunung Jati
Jalan Terusan Pemuda No. 1A Kota Cirebon, Jawa Barat, Indonesia
Telp. 0231-206558 dan Faks. 0231-236742

(Diterima 04/03/26; Direvisi 08/04/26; Disetujui 20/04/26)

Abstract

The issue examined in this study concerns the utilization of village funds for rural development and the strengthening of local human resource competencies allocated annually by the central government. The purpose of this study is to identify the inhibiting and supporting factors as well as the efforts made by the village administration in managing village funds in the areas of village development and strengthening local human resources. This study uses descriptive qualitative methods with a focus on reviewing relevant literature, documents, and archives. The research findings indicate that the use of village funds for village development and strengthening the competence of local human resources in Majalengka Regency has not been fully implemented ideally according to the parameters. Village development administration still faces several challenges, including inadequate village apparatus, complicated regulations, lack of supporting infrastructure, and a village bureaucratic culture that has not completely changed. According to the study, bureaucratic administrative reform at the village level must be carried out in order to improve the capabilities of local human resources through continuous training, increased supervision and transparency, and optimization of the digital village administration system as strategic measures.

Keywords: village funds, rural development, human resources, bureaucratic reform.

Abstrak

Permasalahan yang dikaji dalam studi ini adalah penggunaan dana desa di bidang pembangunan desa dan penguatan kompetensi sumber daya manusia lokal yang diberikan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung serta upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola dana desa di bidang pembangunan desa dan penguatan sumber daya manusia lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan fokus mengkaji studi literatur dan dokumen serta arsip yang relevan. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa penggunaan dana desa untuk

² Email: leni.rohida@ugj.ac.id

pembangunan desa dan penguatan kompetensi sumber daya manusia lokal di Kabupaten Majalengka belum sepenuhnya berjalan dengan ideal sesuai dengan parameter. Administrasi pembangunan desa masih menghadapi beberapa tantangan, di antaranya aparatur desa yang tidak memadai, regulasi yang rumit, kurangnya infrastruktur pendukung, dan budaya birokrasi desa yang belum sepenuhnya berubah. Menurut penelitian, reformasi administrasi birokrasi di tingkat desa harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia lokal melalui pelatihan berkelanjutan, peningkatan pengawasan dan transparansi, serta pengoptimalan sistem digital administrasi desa yang merupakan tindakan strategis.

Kata Kunci: dana desa, pembangunan desa, sumber daya manusia, reformasi birokrasi.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu pilar utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan globalisasi, desa tidak lagi dipandang sebelah mata sebagai unit terkecil dalam sistem pemerintahan, melainkan sebagai entitas yang memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Untuk mendukung hal ini, pemerintah pusat melalui kebijakan dana desa telah memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kapasitas administrasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat desa (Putri & Gunawan, 2025). Dana desa, sebagai instrumen keuangan yang dialokasikan secara khusus untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, diharapkan mampu mempercepat proses pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa (Mulyani *et al.*, 2018).

Tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa adalah rendahnya kompetensi aparatur desa dalam hal administrasi dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel (Situngkir & Simarmata, 2022). Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas SDM lokal agar mampu mengelola dana desa secara efektif dan efisien, sehingga hasil pembangunan yang direncanakan dapat tercapai secara optimal. Penguatan kompetensi ini tidak hanya mencakup aspek teknis pengelolaan keuangan dan administrasi, tetapi juga aspek manajerial dan kewirausahaan desa.

Kabupaten Majalengka merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki potensi besar dalam pengembangan desa, mengingat keberagaman budaya, sumber daya alam, serta potensi ekonomi lokalnya. Sejalan dengan hal tersebut, potensi pengembangan desa mendapat dukungan berupa alokasi dana desa yang cukup besar. Berdasarkan data dari djpk.kemenkeu.go.id pada tahun 2024, Kabupaten Majalengka menerima dana desa sebesar Rp 333.450.000.000. Dana tersebut disalurkan kepada 330 desa di seluruh wilayah Kabupaten Majalengka. Dengan jumlah ini, setiap desa menerima sekitar Rp1.000.000.000 untuk dikelola demi kemajuan dan kemakmuran masyarakat desa. Anggaran sebesar ini menjadi peluang yang sangat potensial untuk melakukan berbagai program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas hidup di tingkat desa. Namun, keberhasilan pengelolaan dana sebesar itu sangat bergantung pada kemampuan desa dalam mengelola administrasi dan sumber daya manusia yang kompeten.

Di balik potensi besar tersebut, pelaksanaan program dana desa di wilayah ini masih menghadapi kendala dalam hal pengelolaan administrasi yang belum maksimal dan kurangnya kompetensi SDM lokal dalam mengelola dana tersebut (Erawati & Chridang, 2023). Pengelolaan administrasi yang belum maksimal seringkali menjadi hambatan dalam memastikan penggunaan dana desa secara transparan dan akuntabel. Kurangnya kompetensi SDM lokal dalam mengelola dana desa juga menjadi faktor penghambat utama. Banyak aparatur desa yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang tata kelola keuangan dan administrasi pembangunan desa yang baik, sehingga potensi dana yang ada belum dapat

dioptimalkan secara penuh untuk pembangunan yang berkelanjutan dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat desa.

Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam pelaksanaan administrasi pembangunan desa serta penguatan kompetensi SDM lokal dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Majalengka. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan solusi konkret dalam meningkatkan kapasitas administrasi dan kompetensi SDM desa, sehingga pengelolaan dana desa menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, diharapkan program dana desa dapat lebih maksimal dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat pemberdayaan desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan Program Dana Desa dalam mendukung peningkatan kapasitas administrasi desa serta penguatan sumber daya manusia lokal. Temuan dari studi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan desa yang lebih mandiri dan berdaya saing.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: (1) bagaimana pelaksanaan administrasi pembangunan desa dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Majalengka?; (2) bagaimana tingkat kompetensi sumber daya manusia lokal desa dalam mendukung pengelolaan dana desa di Kabupaten Majalengka?; (3) apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam penguatan kompetensi SDM lokal serta optimalisasi administrasi pembangunan desa dalam Program Dana Desa di Kabupaten Majalengka?; dan (4) bagaimana upaya strategis yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan administrasi pembangunan desa melalui penguatan kompetensi SDM lokal dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Majalengka?

2. TINJAUAN TEORETIS DAN PENELITIAN SEBELUMNYA

2.1. Administrasi Pembangunan Desa

Bagian penting dari administrasi publik adalah administrasi pembangunan yang berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan secara sistematis untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Menurut Siagian (2019), administrasi pembangunan menekankan kemampuan aparatur pemerintah dalam mengelola sumber daya secara efisien dan efektif untuk mendorong perubahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Administrasi pembangunan adalah instrumen utama dalam pemerintahan desa untuk mengelola program pembangunan yang bersumber dari dana desa.

Administrasi pembangunan desa mencakup perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, dan pertanggungjawaban administrasi kepada pemerintah dan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan untuk mengelola pembangunan desa dan kepentingan masyarakat setempat. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada kualitas administrasi yang dilakukan oleh aparatur desa.

Perencanaan partisipatif, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, dan sistem pengawasan yang efektif adalah ciri dari administrasi pembangunan desa yang baik. Sebaliknya, administrasi yang tidak berjalan secara optimal dapat menyebabkan inefisiensi penggunaan anggaran, kualitas pembangunan yang buruk, dan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

2.2. Program Dana Desa

Program dana desa merupakan kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan secara langsung kepada desa. Penyaluran dana tersebut dilakukan berdasarkan formula yang mempertimbangkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis (Kementerian Keuangan, 2023).

Dana desa dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian desa dan mengurangi ketimpangan pembangunan antara desa dan kota. Peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur desa, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa menjadi fokus utama pemanfaatan dana desa. Namun, keberhasilan dana desa sangat bergantung pada kemampuan administrasi desa dalam mengelolanya secara profesional dan bertanggung jawab.

Dalam implementasinya, pengelolaan dana desa memerlukan tata kelola keuangan yang berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan disiplin anggaran. Sumber daya manusia desa seringkali tidak cukup kuat, terutama dalam hal administrasi dan pengelolaan keuangan. Hal ini sering menyebabkan kegagalan dalam memenuhi prinsip-prinsip tersebut.

2.3. Kompetensi Sumber Daya Manusia Lokal

Keberhasilan organisasi, termasuk pemerintahan desa, sangat bergantung pada kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimilikinya. Kompetensi adalah kumpulan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Menurut Spencer & Spencer (1993) kompetensi adalah merupakan ukuran utama dalam mengevaluasi kinerja individu maupun lembaga pemerintah. Kemampuan SDM lokal dalam pengelolaan dana desa idealnya mencakup kemampuan administratif, pemahaman hukum, keterampilan pengelolaan keuangan, kemampuan perencanaan pembangunan, dan kemampuan manajemen dan kepemimpinan. Rendahnya kemampuan aparatur desa akan berdampak langsung pada perencanaan pembangunan yang buruk, laporan keuangan yang buruk, dan kurangnya inovasi dalam program pemberdayaan masyarakat. Untuk mengoptimalkan pengelolaan dana desa, perlu dilakukan peningkatan kemampuan SDM lokal. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan, pendampingan desa, dan penguatan kelembagaan desa. Melalui SDM yang memadai, aparatur desa diharapkan dapat mengelola dana desa dengan baik dan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun dimensi kompetensi SDM menurut Spencer & Spencer (1993), terdiri dari tiga dimensi utama, yaitu: 1) pengetahuan (*knowledge*); 2) keterampilan (*skills*); dan 3) sikap (*attitude*). Ketiga dimensi tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis tingkat kemampuan aparatur desa dalam melaksanakan tugas pengelolaan Dana Desa, khususnya pada aspek administrasi pembangunan, pengelolaan keuangan desa, serta pemanfaatan sistem administrasi berbasis digital.

2.4. Hubungan Administrasi Pembangunan Desa, Dana Desa, dan Kompetensi SDM Lokal

Administrasi pembangunan desa, dana desa, dan kemampuan SDM lokal adalah tiga hal yang saling berhubungan. Administrasi pembangunan desa memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program dana desa. Dana desa menyediakan sumber daya

keuangan, sedangkan administrasi pembangunan berfungsi mengelola dan mengarahkan pemanfaatannya. Administrasi yang sistematis memungkinkan perencanaan penggunaan dana desa dapat dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, administrasi yang tertib juga mempermudah proses pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada pemerintah daerah maupun masyarakat.

Kompetensi sumber daya manusia lokal merupakan faktor yang menentukan keberhasilan administrasi pembangunan desa. Aparatur desa yang memiliki kompetensi memadai akan mampu menyusun perencanaan pembangunan secara sistematis, melaksanakan program secara efektif, dan melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan. Kompetensi SDM juga memiliki keterkaitan dengan pengelolaan dana desa. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan, termasuk tentang dana desa juga dipengaruhi oleh kemampuan SDM lokal. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh (Yuliana *et al.*, 2021) menemukan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan keterlambatan pelaporan dan rendahnya akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kurangnya kemampuan aparatur desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem administrasi desa berbasis *Information Technology* (IT) memerlukan pendampingan dan penguatan yang intensif.

Upaya meningkatkan kualitas administrasi pembangunan desa serta memastikan bahwa dana desa memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat memerlukan penguatan sumber daya manusia lokal sebagai strategi utama. Tanpa dukungan sumber daya manusia yang kompeten, pemanfaatan dana desa berpotensi tidak berjalan secara optimal. Di sisi lain, program dana desa tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan pembangunan, tetapi juga sebagai sarana peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui program dana desa, aparatur desa memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensi administratif dan manajerial dalam pengelolaan pembangunan desa.

2. 5. Penelitian Sebelumnya

Kajian mengenai pengelolaan dana desa dan penguatan kompetensi aparatur desa telah banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak implementasi kebijakan dana desa semakin diperkuat sebagai instrumen pembangunan nasional. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar & Suryani (2020), mengkaji pengaruh kapasitas administrasi desa terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas perencanaan, pelaporan, dan pengawasan administrasi desa berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kompetensi aparatur desa melalui pelatihan administrasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Selanjutnya, penelitian oleh (Yuliana *et al.*, 2021) meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan Dana Desa berbasis sistem administrasi digital. Penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan kemampuan aparatur desa dalam memahami regulasi dan teknologi informasi menjadi penyebab utama keterlambatan pelaporan dan rendahnya transparansi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya pendampingan teknis dan penguatan literasi digital bagi aparatur desa. Penelitian oleh Hidayani *et al.* (2023) mengkaji implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam meningkatkan transparansi pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Siskeudes mampu meningkatkan akurasi pelaporan keuangan desa, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparatur desa dalam mengoperasikan sistem digital tersebut.

Penelitian oleh Pahlawan *et al.* (2022) mengenai budaya organisasi pemerintahan desa menunjukkan bahwa resistensi terhadap perubahan dan pola kerja tradisional masih menjadi hambatan dalam penerapan administrasi pembangunan berbasis kinerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi budaya organisasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan profesionalisme aparatur desa. Selain itu, penelitian oleh Putri & Kusumawardani (2024) mengenai transformasi digital pelayanan publik menemukan bahwa transparansi dan kompetensi perangkat desa menjadi faktor dominan dan faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan digital di sektor publik, termasuk di tingkat desa. Penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tanpa diimbangi dengan peningkatan kompetensi SDM tidak akan menghasilkan perubahan yang signifikan.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa dan administrasi pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia aparatur desa, sistem administrasi yang digunakan, serta dukungan kelembagaan dan infrastruktur teknologi. Sebagian besar penelitian menekankan bahwa rendahnya kompetensi aparatur desa menjadi hambatan utama dalam mewujudkan tata kelola dana desa yang transparan, akuntabel, dan efektif.

Dari beberapa penelitian tersebut terlihat bahwa penelitian sebelumnya berfokus pada aspek tertentu seperti akuntabilitas keuangan, implementasi sistem digital, dan evaluasi kapasitas aparatur desa secara parsial. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena mengkaji secara komprehensif hubungan antara administrasi pembangunan desa dan penguatan kompetensi SDM lokal dalam pengelolaan dana desa melalui studi kasus di Kabupaten Majalengka. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa serta memperkuat kapasitas aparatur desa secara berkelanjutan. Perbandingan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Sebelumnya

No.	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Keterbatasan /Gap
1	Putri, Gunawan (2025)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Kompetensi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	Menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan kompetensi terhadap efektivitas pengelolaan dana desa	Kuantitatif	Kompetensi aparatur dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa	Penelitian hanya fokus pada aspek keuangan desa dan belum mengkaji digitalisasi pelayanan desa
2	Ariani & Gayantri (2021)	<i>Good Governance</i> , Kompetensi SDM, Budaya Organisasi dan Kinerja Pengelolaan Dana Desa	Mengetahui pengaruh <i>good governance</i> , kompetensi SDM, dan budaya organisasi terhadap kinerja	Kuantitatif	Kompetensi SDM dan budaya organisasi meningkatkan kinerja pengelolaan dana desa	Belum membahas pengaruh teknologi informasi dalam tata kelola desa

3	Suhartini, et.al (2021)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Kompetensi Aparatur Desa, Religiusitas dan Pengawasan Masyarakat	pengelolaan dana desa Menguji pengaruh kompetensi aparatur, religiusitas, dan pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa	Kuantitatif	Pengawasan masyarakat dan kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa	Variabel religiusitas kurang relevan untuk konteks administrasi digital desa
4	Erawati & Chridang (2023)	Hubungan Kompetensi Perangkat Desa dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Menganalisis hubungan kompetensi perangkat desa dan SPI terhadap akuntabilitas dana desa	Kuantitatif	Sistem pengendalian internal memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana desa	Belum membahas efektivitas pelayanan publik berbasis teknologi
5	Yusnita & Salfutra (2021)	Mengukur Kinerja Pengelolaan Dana Desa Berbasis Kompetensi melalui Partisipasi sebagai Variabel Moderasi	Menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja pengelolaan dana desa dengan partisipasi masyarakat sebagai moderasi	Kuantitatif	Partisipasi masyarakat memperkuat pengaruh kompetensi terhadap kinerja	Tidak mengkaji inovasi digital dalam administrasi desa
6	Sulistyowati & Elladevi (2025)	Pengaruh Budaya Organisasi, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Aparatur Desa terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa	Menguji pengaruh budaya organisasi, SPI, dan kompetensi aparatur desa terhadap kinerja pengelolaan dana desa	Kuantitatif	Kompetensi aparatur meningkatkan kinerja pengelolaan dana desa	Penelitian belum mengaitkan transformasi digital pemerintahan desa
7	Pahlawan et al. (2020)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal,	Menguji pengaruh kompetensi aparatur, SPI, TI, dan partisipasi	Kuantitatif	Kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, teknologi	Fokus penelitian hanya pada akuntabilitas keuangan desa

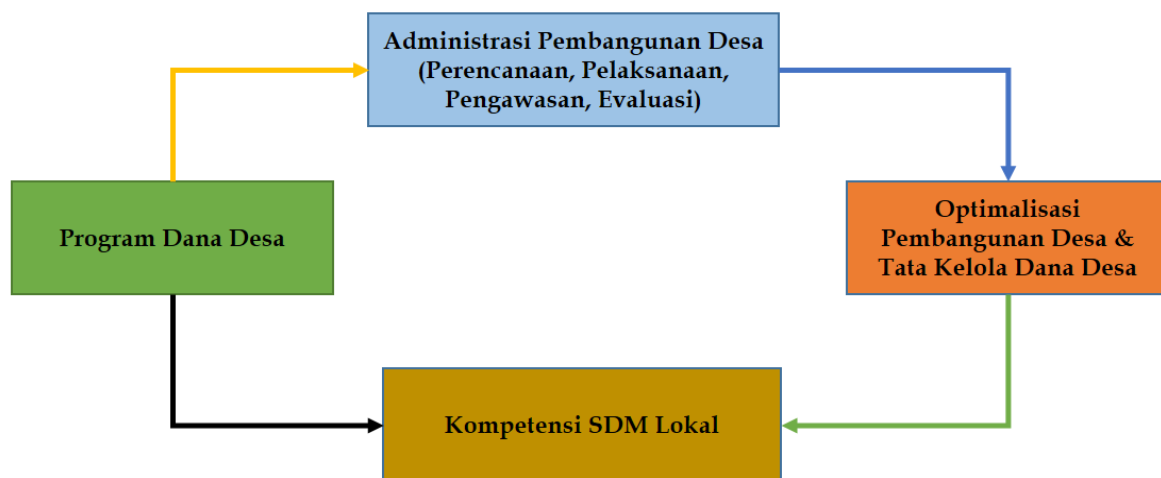
		Pemanfaatan TI, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	masyarakat terhadap akuntabilitas dana desa		informasi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	
8	Azis <i>et. al</i> (2024)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Brebes	Mengetahui pengaruh kompetensi aparatur dan teknologi informasi terhadap akuntabilitas dana desa	Kuantitatif	Pemanfaatan TI meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa	Fokus penelitian hanya pada akuntabilitas keuangan desa
9	Putri & Kusumawardani (2024)	Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa	Kuantitatif	Transparansi dan kompetensi perangkat desa menjadi faktor dominan	Belum mengkaji pelayanan administrasi berbasis digital
10	Situngkir & Simarmata (2022)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Transparansi, dan Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Mengetahui pengaruh kompetensi aparatur, transparansi, dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas dana desa	Kuantitatif	Transparansi dan komitmen organisasi berpengaruh positif	Penelitian belum menghubungkan aspek inovasi pelayanan publik

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2025

Berdasarkan kajian teoretis dan penelitian sebelumnya yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan administrasi pembangunan desa tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran dana desa, tetapi juga sangat ditentukan oleh tingkat kompetensi sumber daya manusia lokal dalam mengelola program pembangunan secara efektif dan akuntabel. Administrasi pembangunan desa berperan sebagai mekanisme pengelolaan yang

mengatur proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan, sedangkan dana desa merupakan instrumen kebijakan fiskal yang menyediakan sumber daya keuangan untuk mendukung kegiatan pembangunan desa.

Di sisi lain, kompetensi sumber daya manusia lokal menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa seluruh tahapan administrasi dapat berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Dengan demikian, hubungan antara administrasi pembangunan desa, program dana desa, dan kompetensi SDM lokal membentuk suatu sistem yang saling berkaitan dalam mewujudkan pembangunan desa yang optimal dan berkelanjutan. Untuk memperjelas hubungan antardimensi yang diteliti dalam penelitian ini, maka disusun kerangka konseptual penelitian yang menggambarkan keterkaitan antara variabel administrasi pembangunan desa, program dana desa, dan kompetensi sumber daya manusia lokal dalam mendukung optimalisasi pembangunan desa di Kabupaten Majalengka. Kerangka tersebut sebagaimana terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Konseptual
Sumber: Analisis Penulis, 2025

Gambar 1 menunjukkan bahwa administrasi pembangunan desa, pengelolaan dana desa, dan kompetensi sumber daya manusia lokal merupakan tiga variabel utama yang saling berhubungan secara sistemik dalam mendukung keberhasilan pembangunan desa. Administrasi pembangunan desa berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan program pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan pembangunan desa. Sementara itu, dana desa berperan sebagai sumber daya finansial yang menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan pembangunan desa. Kompetensi SDM lokal berperan sebagai faktor penggerak yang menentukan keberhasilan pelaksanaan administrasi dan pemanfaatan dana desa secara efektif dan akuntabel.

Menurut Spencer & Spencer (1993), kompetensi meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memengaruhi kinerja individu dalam organisasi. Dalam konteks pemerintahan desa, kompetensi aparatur desa sangat menentukan efektivitas pelaksanaan program dana desa, terutama dalam hal perencanaan kegiatan, pelaporan keuangan, serta pengawasan program pembangunan. Hubungan antara ketiga variabel tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin baik administrasi pembangunan desa dan semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia lokal, maka semakin efektif pengelolaan dana desa. Sebaliknya, rendahnya kompetensi aparatur desa akan berdampak pada lemahnya administrasi pembangunan dan menurunnya efektivitas penggunaan dana desa.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*). Menurut Mestika Zed (2008), studi pustaka bukan sekadar kegiatan membaca dan mencatat, melainkan sebuah metode yang melibatkan pengelolaan bahan pustaka secara sistematis sebagai sumber data utama. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh data dan informasi secara mendalam melalui penelaahan berbagai sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah, artikel ilmiah, jurnal penelitian, dokumen kebijakan, serta data resmi terkait pengelolaan dana desa di Kabupaten Majalengka. Penelitian ini berfokus pada analisis teks dan dokumen terkait administrasi pembangunan desa dan program dana desa di Kabupaten Majalengka untuk menarik kesimpulan yang teoretis dan praktis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi. Sugiyono (2018) mendefinisikan dokumentasi sebagai catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Peneliti melakukan *searching* (pencarian), *identifying* (identifikasi), dan *organizing* (pengorganisasian) terhadap literatur digital maupun fisik yang membahas tentang kompetensi perangkat desa dan tata kelola administrasi di Majalengka.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*). Analisis isi adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat direplikasi dan valid dari teks ke konteks penggunaannya (Krippendorff, 2018). Peneliti membandingkan berbagai kebijakan dan teori untuk melihat kesenjangan (*gap*) antara regulasi dana desa dengan realitas kompetensi SDM di tingkat desa. Proses ini mencakup reduksi data, penyajian data secara deskriptif, dan penarikan kesimpulan secara deduktif.

Untuk menjaga kualitas hasil penelitian, peneliti menggunakan triangulasi teori dan triangulasi sumber data. Moleong (2017) menyatakan bahwa triangulasi teori dilakukan dengan membandingkan perspektif dari berbagai ahli administrasi pembangunan untuk menganalisis satu fenomena yang sama di Kabupaten Majalengka, sehingga hasil analisis menjadi lebih tajam dan objektif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Implementasi Administrasi Pembangunan Desa di Majalengka

Implementasi administrasi pembangunan desa di Kabupaten Majalengka menunjukkan transformasi yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan tingkat lokal sejak penguatan program dana desa. Secara teoretis, dinamika ini sejalan dengan pandangan Tjokroamidjojo (1988) yang menyatakan bahwa administrasi pembangunan bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan sebuah instrumen pengarah untuk mencapai perubahan sosial yang terencana. Manifestasi dari administrasi pembangunan di Majalengka terlihat dari pengadopsian sistem digital dalam pelaporan keuangan desa, yang bertujuan untuk menciptakan transparansi dan efisiensi. Namun, proses transisi menuju digitalisasi ini seringkali terbentur pada realitas kapasitas perangkat desa yang belum merata. Hal ini mempertegas argumen Kaho (2012) bahwa pemberian otonomi yang besar melalui dana perimbangan harus disertai dengan sistem pengawasan administratif yang ketat agar tidak terjadi malapraktik dalam pengelolaan anggaran publik.

Fokus pada penguatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lokal menjadi variabel kunci dalam menentukan keberhasilan pemanfaatan dana desa di Kabupaten Majalengka. Merujuk pada konsep yang dikemukakan oleh Spencer & Spencer (1993),

kompetensi yang dibutuhkan bukan hanya sekadar pengetahuan teknis mengenai aturan hukum, melainkan juga karakteristik dasar dan motif yang mendorong efektivitas kerja. Dalam konteks Majalengka, penguatan SDM melalui dana desa diarahkan pada program-program pelatihan manajerial dan literasi digital bagi aparatur desa. Upaya ini menjadi krusial karena menurut Sedarmayanti (2017), faktor manusia adalah penggerak utama dalam reformasi birokrasi; tanpa peningkatan kapasitas intelektual dan integritas dari para pengelola desa, maka infrastruktur fisik yang dibangun melalui dana desa tidak akan memiliki nilai keberlanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Lebih jauh lagi, sinkronisasi antara kebijakan pusat dengan kebutuhan lokal di Kabupaten Majalengka menuntut adanya administrasi yang partisipatif. Berdasarkan telaah literatur terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka, terlihat adanya upaya untuk menggeser fokus pembangunan dari sekadar pengerjaan proyek fisik menuju pemberdayaan masyarakat yang lebih substantif. Meskipun demikian, studi pustaka ini menemukan bahwa tantangan terbesar di lapangan adalah masih rendahnya indeks literasi administrasi di desa-desa yang letaknya jauh dari pusat perkotaan Majalengka. Hal ini sejalan dengan tesis Tjokroamidjojo (1988) mengenai pentingnya koordinasi yang integratif antara tingkatan pemerintahan. Dana desa yang dialokasikan untuk penguatan SDM di Majalengka diharapkan mampu memutus rantai inefisiensi birokrasi, sehingga aparatur desa tidak hanya mahir dalam menyerap anggaran, tetapi juga cakap dalam menciptakan inovasi pembangunan yang berbasis pada potensi lokal desa masing-masing.

Secara keseluruhan, keberhasilan administrasi pembangunan di Kabupaten Majalengka sangat bergantung pada bagaimana dana desa dikelola secara transparan dan bagaimana investasi pada manusia diprioritaskan. Sebagaimana ditegaskan oleh Kaho (2012) dan Sedarmayanti (2017), akuntabilitas publik dan profesionalisme SDM adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan kemandirian desa. Melalui penguatan kompetensi yang berkelanjutan, diharapkan perangkat desa di Majalengka mampu mentransformasikan dana desa menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif, sekaligus menjaga marwah tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.

Implementasi administrasi pembangunan desa di Kabupaten Majalengka dapat dianalisis melalui empat dimensi utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan desa, sebagai berikut:

- a. **Dimensi perencanaan;** Pada dimensi perencanaan, pelaksanaan administrasi pembangunan desa di Kabupaten Majalengka telah menunjukkan adanya upaya sistematis melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes). Perencanaan pembangunan desa telah mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang disusun secara partisipatif. Namun demikian, kualitas perencanaan masih menghadapi kendala dalam pemanfaatan data berbasis kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun proses perencanaan telah berjalan secara administratif, kualitas substansi perencanaan masih memerlukan peningkatan kapasitas aparatur desa. Secara teoretis, kondisi ini sejalan dengan pandangan Siagian yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan tahap awal yang menentukan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan. Tanpa perencanaan yang matang, pelaksanaan pembangunan berpotensi tidak tepat sasaran.
- b. **Dimensi pelaksanaan;** Pada dimensi pelaksanaan, implementasi administrasi pembangunan desa di Kabupaten Majalengka telah didukung oleh penggunaan sistem administrasi digital, khususnya dalam pelaporan keuangan desa melalui aplikasi Siskeudes. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut memberikan dampak positif terhadap transparansi dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan desa. Namun

demikian, pelaksanaan program masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kompetensi teknis aparatur desa dalam mengoperasikan sistem digital. Hal ini menyebabkan terjadinya keterlambatan pelaporan administrasi di beberapa desa. Menurut Tjokroamidjojo, pelaksanaan pembangunan yang efektif memerlukan kemampuan administratif yang memadai serta dukungan sumber daya manusia yang kompeten.

- c. **Dimensi pengawasan;** Pada dimensi pengawasan, implementasi administrasi pembangunan desa telah didukung oleh pengawasan internal melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta pengawasan eksternal dari pemerintah daerah. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa dilakukan secara transparan dan akuntabel. Namun demikian, efektivitas pengawasan masih dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman aparatur desa terhadap mekanisme pengendalian administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Menurut Kaho, pengawasan administratif merupakan bagian penting dalam menjaga akuntabilitas penggunaan dana publik.
- d. **Dimensi evaluasi;** Pada dimensi evaluasi, pelaksanaan administrasi pembangunan desa di Kabupaten Majalengka masih menunjukkan kelemahan dalam pelaksanaan evaluasi program secara sistematis. Evaluasi yang dilakukan selama ini lebih bersifat administratif dan belum sepenuhnya mengukur dampak pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa evaluasi pembangunan desa masih perlu ditingkatkan melalui penggunaan indikator kinerja yang terukur dan sistematis.

4. 2. Implementasi Administrasi Pembangunan Desa dan Penguatan Kompetensi SDM Lokal Melalui Dana Desa

Implementasi administrasi pembangunan desa di Kabupaten Majalengka menunjukkan transformasi yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan tingkat lokal sejak penguatan program dana desa. Secara teoretis, dinamika ini sejalan dengan pandangan Tjokroamidjojo (1988) yang menyatakan bahwa administrasi pembangunan bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan sebuah instrumen pengarah untuk mencapai perubahan sosial yang terencana. Di Majalengka, manifestasi dari administrasi pembangunan ini terlihat dari penerapan sistem digital dalam pelaporan keuangan desa, yang bertujuan untuk menciptakan transparansi dan efisiensi. Namun, proses transisi menuju digitalisasi ini sering kali terbentur pada realitas kapasitas perangkat desa yang belum merata. Hal ini mempertegas argumen Kaho (2012) bahwa pemberian otonomi yang besar melalui dana perimbangan harus disertai dengan sistem pengawasan administratif yang ketat agar tidak terjadi malapraktik dalam pengelolaan anggaran publik.

Fokus pada penguatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lokal menjadi variabel kunci dalam menentukan keberhasilan pemanfaatan dana desa di Kabupaten Majalengka. Merujuk pada konsep yang dikemukakan oleh Spencer & Spencer (1993), kompetensi yang dibutuhkan bukan hanya sekadar pengetahuan teknis mengenai aturan hukum, melainkan juga karakteristik dasar dan motif yang mendorong efektivitas kerja. Dalam konteks Majalengka, penguatan SDM melalui dana desa diarahkan pada program-program pelatihan manajerial dan literasi digital bagi para aparatur desa. Upaya ini menjadi krusial karena menurut Sedarmayanti (2017), faktor manusia adalah penggerak utama dalam reformasi birokrasi. Tanpa adanya peningkatan kapasitas intelektual dan integritas dari para pengelola desa, maka infrastruktur fisik yang dibangun melalui dana desa tidak akan memiliki nilai keberlanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Lebih jauh lagi, sinkronisasi antara kebijakan pusat dengan kebutuhan lokal di Kabupaten Majalengka menuntut adanya administrasi yang partisipatif. Berdasarkan telaah

literatur terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka, terlihat adanya upaya untuk menggeser fokus pembangunan dari sekadar pengerjaan proyek fisik menuju pemberdayaan masyarakat yang lebih substantif. Meskipun demikian, studi pustaka ini menemukan bahwa tantangan terbesar di lapangan adalah masih rendahnya indeks literasi administrasi di desa-desa yang letaknya jauh dari pusat perkotaan Majalengka. Hal ini sejalan dengan Tjokroamidjojo (1988) mengenai pentingnya koordinasi yang integratif antara tingkatan pemerintahan. Dana desa yang dialokasikan untuk penguatan SDM di Majalengka diharapkan mampu memutus rantai inefisiensi birokrasi, sehingga aparatur desa tidak hanya mahir dalam menyerap anggaran, tetapi juga mampu dalam menciptakan inovasi pembangunan yang berbasis pada potensi lokal desa masing-masing.

Secara keseluruhan, keberhasilan administrasi pembangunan di Kabupaten Majalengka sangat bergantung pada bagaimana dana desa dikelola secara transparan dan bagaimana investasi pada manusia diprioritaskan. Sebagaimana ditegaskan oleh Kaho (2012) dan Sedarmayanti (2017), akuntabilitas publik dan profesionalisme SDM adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan kemandirian desa. Melalui penguatan kompetensi yang berkelanjutan, diharapkan perangkat desa di Majalengka mampu mentransformasikan dana desa menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif, sekaligus menjaga marwah tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.

4.2.1. Dimensi Administrasi Pembangunan Desa

Pembahasan hasil penelitian mengenai administrasi pembangunan desa dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Majalengka dapat dianalisis berdasarkan beberapa dimensi utama, yaitu perencanaan pembangunan, pelaksanaan program, pengelolaan administrasi keuangan, serta pengawasan dan evaluasi pembangunan. Pada dimensi perencanaan pembangunan desa, berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen perencanaan pembangunan desa, laporan penyelenggaraan pemerintah desa, serta telaah terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan APBDes di beberapa desa Kabupaten Majalengka tahun 2022-2024, penelitian ini menemukan bahwa proses perencanaan telah dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme tersebut digunakan sebagai forum partisipatif dalam menyusun prioritas program pembangunan desa, menentukan kebutuhan masyarakat, serta menetapkan arah penggunaan dana desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara normatif, proses ini telah sesuai dengan prinsip partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam regulasi pembangunan desa. Namun, secara substantif masih ditemukan keterbatasan dalam kualitas perencanaan, terutama dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang belum sepenuhnya berbasis data dan analisis kebutuhan masyarakat secara komprehensif.

Keterbatasan ini menunjukkan bahwa aparatur desa masih memerlukan peningkatan kapasitas dalam aspek perencanaan strategis dan analisis kebutuhan pembangunan. Tanpa adanya perencanaan yang matang, program pembangunan yang dibiayai melalui dana desa berpotensi tidak tepat sasaran dan kurang memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Pada dimensi pelaksanaan program pembangunan desa, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan pembangunan fisik seperti pembangunan jalan desa, drainase, dan fasilitas umum telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa dalam mengimplementasikan program pembangunan yang bersumber dari dana desa. Namun

demikian, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat masih belum optimal dibandingkan pembangunan fisik. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman aparatur desa mengenai konsep pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. Program pemberdayaan yang seharusnya menjadi prioritas dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa masih belum mendapatkan perhatian yang memadai.

Pada dimensi pengelolaan administrasi keuangan desa, penggunaan sistem digital seperti aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aparatur desa mulai terbiasa melakukan pencatatan transaksi secara sistematis dan terstruktur. Meskipun demikian, masih terdapat kendala dalam hal pemahaman teknis penggunaan sistem digital, terutama di desa-desa yang memiliki keterbatasan akses teknologi dan sumber daya manusia yang belum terbiasa dengan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan dan berpotensi menimbulkan kesalahan administratif. Dimensi pengawasan dan evaluasi pembangunan desa menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal dan eksternal telah berjalan, namun belum sepenuhnya efektif. Pengawasan internal oleh kepala desa dan perangkat desa masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya berorientasi pada kualitas hasil pembangunan. Sementara itu, pengawasan eksternal oleh pemerintah daerah dan masyarakat telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana desa. Partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol sosial menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran desa.

4.2.2. Dimensi Program Dana Desa

Mengenai dimensi alokasi dana desa, hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi dana desa di Kabupaten Majalengka telah mengikuti formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Hal ini memberikan peluang bagi desa untuk merencanakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun demikian, besarnya alokasi dana desa belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan kapasitas administrasi desa. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah anggaran yang tersedia dengan kemampuan aparatur desa dalam mengelola dana tersebut secara optimal.

Pemanfaatan dana desa di Kabupaten Majalengka cenderung lebih banyak diarahkan pada pembangunan fisik dibandingkan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen APBDes dan laporan realisasi dana desa tahun 2022-2024 di beberapa desa di Kabupaten Majalengka, rata-rata alokasi penggunaan dana desa mencapai sekitar 60-70% untuk pembangunan infrastruktur fisik, seperti pembangunan jalan desa, drainase, rehabilitasi fasilitas umum, sarana air bersih, dan fasilitas lingkungan desa. Sementara itu, alokasi untuk program pemberdayaan masyarakat, pelatihan ekonomi produktif, pengembangan kapasitas masyarakat dan peningkatan kompetensi SDM aparatur desa rata-rata masih berada pada kisaran 20-30% dari total anggaran dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi pembangunan desa masih berfokus pada pembangunan infrastruktur yang bersifat jangka pendek. Padahal, secara konseptual, dana desa seharusnya dimanfaatkan secara seimbang antara pembangunan fisik dan pengembangan kapasitas masyarakat. Kurangnya pemanfaatan dana desa untuk kegiatan pelatihan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menunjukkan perlunya perubahan paradigma dalam pengelolaan dana desa.

Pada dimensi transparansi penggunaan dana desa, pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya seperti pemasangan papan informasi anggaran dan penyampaian laporan

penggunaan dana kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran pemerintah desa dalam menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Namun demikian, transparansi yang dilakukan masih bersifat formalitas administratif dan belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik yang substantif.

Akuntabilitas pelaporan keuangan desa telah mengalami peningkatan seiring dengan penggunaan sistem administrasi berbasis teknologi. Laporan keuangan desa menjadi lebih sistematis dan mudah dipantau oleh pemerintah daerah setelah penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan administrasi dana desa. Berdasarkan hasil evaluasi administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Majalengka tahun 2022-2024, penggunaan sistem digital tersebut membantu pemerintah desa dalam proses pencatatan transaksi, penyusunan APBDes, serta pelaporan realisasi penggunaan dana desa secara lebih terstruktur dan terdokumentasi. Selain itu pemerintah daerah juga lebih mudah melakukan monitoring dan verifikasi administrasi karena laporan keuangan desa telah menggunakan format pelaporan yang terstandarisasi secara digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi pelaporan keuangan desa, terutama terkait ketepatan waktu penyampaian laporan dan kesesuaian dengan standar administrasi yang berlaku. Berdasarkan hasil monitoring administrasi dana desa tahun 2023, sekitar 20-25% desa di Kabupaten Majalengka masih mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan realisasi dana desa pada setiap tahun pencairan anggaran. Selain itu, hasil verifikasi administrasi menunjukkan masih ditemukannya kesalahan administratif seperti ketidaksesuaian kode rekening, kesalahan penginputan data transaksi, serta ketidaksesuaian format laporan dengan regulasi terbaru pengelolaan keuangan desa. Kondisi tersebut umumnya terjadi pada desa-desa yang memiliki keterbatasan kemampuan administrasi digital aparatur desa serta keterbatasan akses teknologi informasi. Berdasarkan laporan pendampingan desa dan evaluasi penggunaan Siskeudes, beberapa aparatur desa masih mengalami kesulitan dalam menyesuaikan perubahan sistem pelaporan berbasis digital dan memahami pembaruan regulasi administrasi keuangan desa yang dilakukan secara berkala oleh pemerintah pusat. Akibatnya, proses verifikasi laporan oleh pemerintah daerah sering membutuhkan perbaikan administrasi sebelum laporan dinyatakan sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku.

4.2.3. Dimensi Kompetensi SDM Lokal

Kompetensi administratif aparatur desa menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan dana desa di Kabupaten Majalengka. Berdasarkan hasil evaluasi administrasi dana desa dan telaah terhadap dokumen pendampingan desa tahun 2022-2024, penelitian ini menemukan bahwa sebagian aparatur desa masih memiliki keterbatasan dalam memahami prosedur administrasi dan regulasi pengelolaan dana desa, khususnya terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban, penginputan administrasi berbasis digital, serta penyesuaian terhadap perubahan regulasi keuangan desa. Indikasi kondisi tersebut terlihat dari masih ditemukannya keterlambatan pelaporan administrasi pada sekitar 20-25% desa, serta adanya kesalahan administratif seperti ketidaksesuaian kode rekening, ketidaklengkapan dokumen pertanggungjawaban, dan kesalahan penginputan data keuangan dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Kondisi tersebut berpotensi menghambat kelancaran pelaksanaan program pembangunan desa karena proses pencairan dana desa tahap berikutnya harus menunggu penyelesaian verifikasi administrasi dari pemerintah daerah.

Selain kompetensi administratif, kompetensi manajerial aparatur desa juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan pembangunan desa. Kompetensi ini berkaitan dengan

kemampuan aparatur dalam merencanakan, mengorganisasi, mengoordinasikan, dan mengendalikan program pembangunan desa secara efektif. Berdasarkan hasil penelitian dan telaah dokumen RPKDes serta laporan pelaksanaan pembangunan desa, kemampuan manajerial aparatur desa di Kabupaten Majalengka masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek koordinasi antarperangkat desa, pengambilan keputusan berbasis data, serta penyusunan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Indikasi lemahnya kompetensi manajerial terlihat dari masih dominannya program-program pembangunan fisik yang bersifat rutin setiap tahun tanpa disertai analisis kebutuhan masyarakat dan potensi desa secara komprehensif. Selain itu, hasil monitoring pembangunan desa menunjukkan bahwa sebagian program pemberdayaan masyarakat belum berjalan optimal karena lemahnya koordinasi pelaksanaan program dan minimnya evaluasi berbasis capaian kinerja. Dalam beberapa kasus, penyusunan program pembangunan desa masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya menggunakan data sosial-ekonomi masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kompetensi manajerial aparatur desa menjadi kebutuhan penting dalam mendukung efektivitas administrasi pembangunan desa dan optimalisasi pengelolaan dana desa di Kabupaten Majalengka.

Kompetensi teknis keuangan menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam pengelolaan dana desa. Aparatur desa dituntut memiliki kemampuan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), melakukan pencatatan transaksi, menyusun laporan realisasi anggaran, serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban dana desa sesuai standar administrasi yang berlaku. Berdasarkan hasil evaluasi administrasi keuangan desa dan laporan pendampingan desa tahun 2022-2024, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat keterbatasan pemahaman teknis aparatur desa dalam pengelolaan administrasi keuangan desa, khususnya terkait penggunaan kode rekening, penyesuaian format laporan keuangan, dan penginputan transaksi pada aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Indikasi keterbatasan tersebut terlihat dari masih ditemukannya kesalahan administratif dalam laporan keuangan desa, seperti ketidaksesuaian pencatatan transaksi dalam laporan keuangan desa, serta perlunya revisi dokumen pertanggungjawaban keuangan sebelum diverifikasi oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hasil monitoring Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka tahun 2023, ditemukan bahwa sekitar 20-25% desa masih mengalami keterlambatan pelaporan administrasi pada setiap tahun pencairan dana desa akibat keterbatasan kemampuan teknis aparatur desa dalam pengelolaan administrasi keuangan berbasis digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kompetensi teknis keuangan aparatur desa masih memerlukan penguatan melalui pelatihan dan pendampingan administrasi secara berkelanjutan.

Selain kompetensi teknis keuangan, perkembangan teknologi juga menuntut aparatur desa untuk memiliki literasi digital yang memadai dalam mendukung administrasi pembangunan desa. Penggunaan aplikasi berbasis teknologi seperti Siskeudes memerlukan kemampuan teknis dalam pengoperasian komputer, penginputan data administrasi, pengelolaan dokumen digital, serta pemahaman terhadap sistem pelaporan elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi digital aparatur desa di Kabupaten Majalengka masih bervariasi antardesa. Aparatur desa di wilayah yang memiliki akses teknologi dan pelatihan yang lebih baik cenderung lebih mampu mengoperasikan sistem administrasi digital secara mandiri. Sebaliknya, di beberapa desa yang memiliki keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan akses internet, aparatur desa masih mengalami kesulitan dalam penggunaan aplikasi administrasi digital. Berdasarkan hasil evaluasi pendampingan desa tahun 2022-2024, beberapa desa masih mengalami hambatan dalam proses penginputan data keuangan, pengunggahan laporan administrasi, dan penyesuaian sistem pelaporan berbasis digital akibat rendahnya kemampuan literasi teknologi aparatur

desa. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian desa masih bergantung pada tenaga pendamping desa atau operator administrasi tertentu dalam pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan dana desa.

4.2.4. Optimalisasi Pembangunan Desa

Efektivitas pembangunan desa dapat dilihat dari sejauh mana program pembangunan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan fisik desa di Kabupaten Majalengka relatif berjalan dengan baik. Hal ini disimpulkan berdasarkan hasil telaah terhadap dokumen APBDes, laporan realisasi dana desa tahun 2022-2024, serta laporan pelaksanaan pembangunan desa yang menunjukkan bahwa sebagian besar program pembangunan infrastruktur desa, seperti pembangunan jalan lingkungan, drainase, sarana air bersih, rehabilitasi fasilitas umum dan fasilitas pelayanan masyarakat, telah direalisasikan sesuai dengan rencana kegiatan yang tercantum dalam RKPDes dan APBDes. Selain itu, hasil monitoring Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Majalengka menunjukkan bahwa mayoritas desa mampu menyelesaikan kegiatan pembangunan fisik dalam satu tahun anggaran sesuai tahapan pelaksanaan desa.

Namun demikian, dampak pembangunan tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan masih belum optimal. Kesimpulan ini, diperoleh dari hasil analisis data sosial ekonomi masyarakat desa, dokumen evaluasi pembangunan desa, serta telaah terhadap program pemberdayaan masyarakat yang masih relatif terbatas dibandingkan pembangunan fisik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Majalengka tahun 2023, masih terdapat desa-desa dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang relatif tinggi, terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses ekonomi dan lapangan kerja produktif. Selain itu, berdasarkan hasil telaah terhadap dokumen penggunaan dana desa tahun 2022-2024, ditemukan bahwa sekitar 60-70% alokasi dana desa masih difokuskan pada pembangunan infrastruktur fisik, sedangkan alokasi untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelatihan keterampilan, penguatan UMKM desa, dan pengembangan kapasitas masyarakat masih berada pada kisaran 20-30% dari total anggaran desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa masih lebih berorientasi pada pembangunan fisik jangka pendek dibandingkan penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Indikasi lainnya terlihat dari masih terbatasnya program pembangunan berbasis potensi ekonomi lokal desa dan belum optimalnya peningkatan pendapatan masyarakat desa setelah pelaksanaan program dana desa. Dengan demikian, hasil penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan fisik belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata karena pembangunan desa masih memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi antara pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Efisiensi penggunaan anggaran menunjukkan sejauh mana dana desa dimanfaatkan secara optimal tanpa terjadi pemborosan. Secara umum, penggunaan dana desa telah dilakukan sesuai dengan rencana anggaran, namun masih terdapat potensi inefisiensi akibat perencanaan yang kurang matang.

Penggunaan dana desa telah memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di desa, seperti perbaikan fasilitas umum dan peningkatan akses pelayanan administratif. Berdasarkan hasil telaah dokumen APBDes dan laporan realisasi pembangunan desa tahun 2022-2024, dana desa telah digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan desa, drainase, sarana air bersih, balai desa, fasilitas pelayanan masyarakat, serta sarana pendukung administrasi pemerintahan desa. Selain itu, penggunaan sistem

administrasi berbasis digital seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) juga mulai meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi dan pengelolaan dokumen pemerintah desa secara lebih sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tersebut memberikan dampak positif terhadap aksesibilitas masyarakat dan pelayanan administrasi desa. Indikasinya terlihat dari meningkatnya kemudahan akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan publik desa serta semakin tertatanya administrasi pemerintahan desa melalui penggunaan sistem digital. Namun demikian, peningkatan kualitas pelayanan publik belum merata di seluruh desa. Berdasarkan hasil evaluasi pembangunan desa dan monitoring administrasi desa tahun 2023, masih terdapat desa-desa yang memiliki keterbatasan fasilitas pelayanan publik, akses teknologi informasi, dan kualitas SDM aparatur desa, terutama pada wilayah pedesaan yang relatif jauh dari pusat pemerintahan kabupaten.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberlanjutan pembangunan desa masih menjadi tantangan dalam implementasi dana desa. Kesimpulan ini diperoleh dari hasil analisis terhadap dokumen RKPDes dan APBDes yang menunjukkan bahwa sebagian program pembangunan desa masih bersifat jangka pendek dan lebih berorientasi pada pembangunan fisik rutin setiap tahun. Hal ini terlihat dari penggunaan dana desa tahun 2022-2024, dimana, sekitar 60-70% anggaran dana desa masih difokuskan pada pembangunan infrastruktur fisik, sementara program pengembangan ekonomi lokal, penguatan kapasitas masyarakat, dan pemberdayaan berbasis potensi desa masih relatif terbatas. Indikasi kurang optimalnya aspek keberlanjutan terlihat dari masih minimnya program pengembangan usaha desa berbasis potensi lokal, pelatihan ekonomi produktif masyarakat, serta penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat secara jangka panjang. Dalam beberapa kasus, pembangunan fisik desa belum disertai dengan perencanaan pemeliharaan dan pengembangan program secara berkelanjutan sehingga manfaat pembangunan belum sepenuhnya memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan desa di Kabupaten Majalengka masih memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi antara pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan potensi ekonomi lokal desa agar pelaksanaan dana desa tidak hanya menghasilkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga mampu menciptakan keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara jangka panjang.

4.3. Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Administrasi Pembangunan Desa dan Penguatan Kompetensi SDM Lokal dalam Dana Desa

Implementasi administrasi pembangunan desa dan penguatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lokal di Kabupaten Majalengka didorong oleh sejumlah faktor pendukung yang saling berinteraksi secara sistematis. Faktor pendukung utama bermula dari adanya landasan hukum yang kuat dan komitmen regulasi di tingkat daerah. Sebagaimana dijelaskan oleh (Adisasmita, 2013), keberhasilan pembangunan perdesaan sangat bergantung pada kerangka regulasi yang memberikan otonomi luas bagi desa untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Di Kabupaten Majalengka, hal ini termanifestasi melalui peraturan bupati yang secara spesifik mengatur petunjuk teknis penggunaan dana desa untuk peningkatan kapasitas aparatur. Dukungan regulasi ini menciptakan kepastian hukum bagi pemerintah desa untuk tidak hanya menghabiskan anggaran pada sektor fisik, tetapi juga mengalokasikannya untuk program-program peningkatan keahlian dan sertifikasi perangkat desa, yang merupakan syarat mutlak dalam administrasi pembangunan modern.

Selanjutnya, ketersediaan teknologi informasi dan adopsi sistem administrasi digital menjadi akselerator penting di Majalengka. Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang telah terintegrasi secara daring di sebagian besar desa di Majalengka mempermudah proses pelaporan dan pertanggungjawaban. Menurut Siagian (2014), efisiensi administrasi dalam organisasi publik sangat ditentukan oleh pemanfaatan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran komunikasi dan pengolahan data. Faktor pendukung ini memungkinkan perangkat desa di Majalengka untuk bekerja lebih akurat dan transparan, sehingga mengurangi risiko kesalahan administratif yang sering menjadi kendala di masa lalu. Integrasi teknologi ini juga menuntut SDM lokal untuk terus belajar, yang secara tidak langsung menciptakan budaya organisasi yang berbasis pada pengembangan diri dan profesionalisme.

Selain aspek teknis, faktor kepemimpinan dan dukungan kelembagaan dari Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memegang peranan vital. Pendampingan yang dilakukan secara berkala oleh tenaga ahli dan pendamping desa menjadi salah satu faktor pendukung dalam penguatan kompetensi aparatur desa di Kabupaten Majalengka. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Majalengka tahun 2022-2024, setiap desa memperoleh pendampingan administratif dan teknis dari tenaga pendamping profesional yang terdiri atas tenaga ahli pemberdayaan masyarakat kabupaten, pendamping desa, dan pendamping lokal desa. Pendampingan tersebut dilakukan dalam bentuk pembinaan administrasi pengelolaan dana desa, pelatihan penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), asistensi penyusunan APBDes dan RKPDes, serta monitoring pelaksanaan program pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan dilakukan secara berkala melalui: bimbingan teknis pengelolaan dana desa; pelatihan administrasi dan pelaporan keuangan desa; asistensi penggunaan aplikasi Siskeudes; monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa; pendampingan musyawarah desa (Musdes) dan Musrenbangdes. Selain itu, berdasarkan laporan pendampingan desa Kabupaten Majalengka tahun 2023, tenaga pendamping desa juga berperan dalam membantu aparatur desa menyelesaikan kendala administratif, melakukan verifikasi dokumen pelaporan, serta memberikan konsultasi terkait perubahan regulasi pengelolaan dana desa. Pendampingan tersebut menjadi penting karena masih terdapat aparatur desa yang mengalami keterbatasan pemahaman administrasi keuangan dan penggunaan sistem digital pemerintahan desa.

Indikasi efektivitas pendampingan terlihat dari meningkatnya kemampuan desa dalam menyusun laporan administrasi secara digital dan semakin tertibnya pengelolaan keuangan desa setelah dilakukan pelatihan dan asistensi teknis secara berkala. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa intensitas pendampingan masih belum sepenuhnya merata di seluruh desa, terutama pada desa-desa yang memiliki keterbatasan akses geografis dan infrastruktur teknologi informasi. Oleh karena itu, penguatan peran tenaga ahli dan pendamping desa masih diperlukan untuk mendukung peningkatan kompetensi SDM aparatur desa secara berkelanjutan di Kabupaten Majalengka. Dalam pandangan Hasibuan (2016), pengembangan SDM yang efektif memerlukan bimbingan dan pelatihan yang berkesinambungan agar potensi individu dapat selaras dengan tujuan organisasi. Di Majalengka, sinergi antara instruksi bupati dengan pendampingan lapangan memastikan bahwa dana yang dikucurkan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas manajerial perangkat desa. Hal ini didukung pula oleh semangat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), di mana aspirasi warga menjadi kontrol sosial sekaligus pendorong bagi perangkat desa untuk mengelola administrasi secara lebih akuntabel.

Terakhir, faktor kondisi sosial-ekonomi Kabupaten Majalengka yang sedang berkembang pesat dengan adanya proyek strategis nasional memberikan motivasi tambahan bagi penguatan SDM lokal. Kesadaran bahwa desa harus mampu bersaing di tengah arus modernisasi mendorong pemerintah desa untuk memprioritaskan dana desa pada sektor pemberdayaan. Ndraha (2011) menekankan bahwa lingkungan eksternal yang dinamis akan memaksa sebuah sistem administrasi untuk meningkatkan kapabilitasnya agar tetap relevan. Tekanan positif dari perkembangan wilayah Majalengka ini menjadi faktor eksternal yang mendukung percepatan reformasi administrasi di tingkat desa. Dengan demikian, kombinasi antara regulasi yang tepat, kesiapan teknologi, pendampingan yang intensif, dan tuntutan perkembangan zaman menjadi fondasi yang kokoh bagi keberhasilan administrasi pembangunan dan penguatan SDM lokal melalui program dana desa di Kabupaten Majalengka.

Implementasi program dana desa di Kabupaten Majalengka masih mengalami kendala akibat sejumlah faktor yang bersifat multifaset, meskipun program ini dirancang sebagai alat strategis untuk meningkatkan tata kelola pembangunan dan kompetensi sumber daya manusia lokal. Hambatan utama adalah kapasitas sumber daya manusia aparatur desa yang masih kurang, baik dari segi keahlian manajerial, literasi keuangan, maupun pengetahuan administrasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Suhartini, et.al, 2021), perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana desa yang kurang baik secara langsung dipengaruhi oleh ketidakmampuan aparatur desa. Dana desa tidak sepenuhnya dimanfaatkan sebagai alat pembangunan jangka panjang dan berkelanjutan akibat kondisi ini.

Kompleksitas regulasi dan beban administrasi yang berat merupakan hambatan penting selain komponen kompetensi. Pejabat desa harus segera menyesuaikan diri dengan berbagai peraturan teknis yang mengatur dana desa, yang sering berubah. Namun, keterampilan adaptif ini tidak selalu disertai dengan pelatihan yang memadai. Studi (Ariani & Gayantri, 2021) membuktikan bahwa kerumitan aturan yang mengatur administrasi dana desa sering mendorong pejabat desa untuk lebih berkonsentrasi menyelesaikan tugas administrasi formal daripada kaliber pembangunan desa yang sebenarnya. Oleh karena itu, administrasi pembangunan biasanya kurang kreatif dan lebih prosedural.

Kekurangan infrastruktur pendukung dan kesenjangan dalam akses teknologi informasi, khususnya di desa-desa yang secara geografis jauh dari pusat pemerintahan kabupaten, merupakan hambatan yang terjadi dalam poin berikutnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Azis *et.al* (2024) pemanfaatan teknologi informasi meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan pelaporan di Majalengka dan meningkatnya ketergantungan perangkat desa terhadap pihak luar seperti fasilitator atau pendamping desa.

Namun di sisi lain, penguatan keterampilan sumber daya manusia lokal terhambat oleh budaya birokrasi desa yang tradisional. Alih-alih melihat administrasi sebagai alat untuk pembangunan strategis, beberapa pejabat desa masih memandangnya hanya sebagai tugas administratif semata. Hal ini konsisten dengan temuan Pahlawan *et al.* (2020), yang menyatakan bahwa proses peningkatan kapasitas aparatur terhambat oleh resistensi terhadap perubahan dan rendahnya budaya belajar organisasi dalam pemerintahan desa. Inisiatif pelatihan yang didukung oleh dana desa umumnya tidak secara signifikan meningkatkan kinerja administrasi pembangunan kecuali terdapat perubahan paradigma kerja.

Sistem yang tidak memadai untuk memantau dan menilai inisiatif pengembangan sumber daya manusia di desa menjadi hambatan lainnya. Kompetensi aparatur meningkatkan kinerja pengelolaan dana desa. Sulistyowati & Elladevi (2025) menyatakan bahwa kurangnya evaluasi berkelanjutan menyebabkan peningkatan kapasitas aparat desa

bersifat sementara dan tidak tertanam dalam prosedur kerja rutin. Keadaan ini pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas dana desa sebagai alat untuk mengembangkan sumber daya manusia lokal.

Oleh karena itu, hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa masalah struktural, kultural, dan kelembagaan, selain aspek teknis dari pengelolaan dana desa, merupakan hambatan utama dalam pelaksanaan administrasi pembangunan desa dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia lokal di Kabupaten Majalengka. Akibatnya, diperlukan pendekatan kebijakan yang menekankan tidak hanya peningkatan alokasi anggaran tetapi juga penyederhanaan regulasi, penguatan infrastruktur pendukung, dan penciptaan budaya birokrasi desa yang fleksibel serta kompeten.

4. 4. Upaya yang Telah Dilakukan dalam Penguatan Kompetensi SDM Lokal melalui Dana Desa

Upaya meningkatkan tata kelola pembangunan desa dan memperkuat keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal melalui dana desa di Kabupaten Majalengka, beberapa telah berfokus pada strategi yang bersifat berkelanjutan, yang kemudian dijadikan sebagai program penting. Upaya yang pertama adalah meningkatkan kapasitas aparatur desa dengan memberikan pelatihan berkelanjutan dan dukungan teknis. Hal tersebut telah dilaksanakan di beberapa desa di Kabupaten Majalengka. Pemahaman terhadap peraturan, pengelolaan keuangan desa, serta pengembangan keterampilan administratif dan pembangunan merupakan bagian dari penguatan kompetensi ini. Secara umum, hal ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan tertib administrasi. Berdasarkan sejumlah penelitian, efektivitas aparatur desa memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, yang menjadikan pelatihan terstruktur sebagai kebutuhan penting di desa.

Upaya kedua adalah mengoptimalkan penggunaan sistem administrasi dan keuangan desa berbasis teknologi digital, khususnya dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Efisiensi pelaporan, transparansi pengelolaan dana desa, serta akurasi pencatatan meningkat secara signifikan melalui digitalisasi administrasi desa. Penelitian (Yusnita & Salfutra, 2021) menunjukkan bahwa penerapan Siskeudes dapat meningkatkan standar akuntabilitas keuangan desa, namun keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan kelembagaan dan kesiapan sumber daya manusia. Oleh karena itu, untuk menjamin bahwa administrasi pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan sukses, peningkatan kompetensi aparat desa harus sejalan dengan pembelajaran teknologi informasi.

Upaya ketiga adalah meningkatkan pengawasan dan transparansi pengelolaan dana desa melalui keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah. Transparansi dan akuntabilitas merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan publik, bahkan di tingkat desa, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa pengawasan bertingkat dari pemerintah daerah dan keterlibatan masyarakat dapat mengurangi kemungkinan penyalahgunaan serta mendorong aparatur desa untuk mengelola pembangunan secara lebih bertanggung jawab dan profesional.

Pengelolaan dana desa di Kabupaten Majalengka diharapkan dapat berfungsi lebih efisien dan berkelanjutan, serta mendukung terwujudnya administrasi pembangunan desa yang profesional dan akuntabel, dengan memusatkan upaya untuk meningkatkan kapasitas

sumber daya manusia, memanfaatkan sistem digital, serta penguatan pengawasan dan transparansi. Sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas, penguatan kompetensi sumber daya manusia lokal di Kabupaten Majalengka dapat dianalisis melalui beberapa dimensi utama, yaitu pengetahuan, keterampilan, kemampuan manajerial, dan sikap profesional.

- a. **Dimensi pengetahuan;** Peningkatan pengetahuan aparatur desa dilakukan melalui kegiatan pelatihan terkait regulasi pengelolaan dana desa serta administrasi pembangunan desa. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur terhadap prosedur administrasi yang berlaku, di mana tingkat pemahaman aparatur desa masih bervariasi, terutama pada desa-desa yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber informasi.
- b. **Dimensi keterampilan;** Pada dimensi keterampilan, peningkatan kompetensi aparatur desa diarahkan pada kemampuan teknis pengelolaan keuangan desa serta penggunaan sistem administrasi digital. Penggunaan aplikasi Siskeudes menjadi salah satu indikator penting dalam meningkatkan keterampilan teknis aparatur desa, karena keterampilan ini masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan.
- c. **Dimensi kemampuan manajerial;** Kemampuan manajerial aparatur desa menjadi faktor penting dalam mengelola dana desa secara efektif. Aparatur desa di Kabupaten Majalengka telah menunjukkan adanya peningkatan dalam kemampuan mengelola kegiatan pembangunan desa, walaupun kemampuan dalam menyusun perencanaan strategis jangka panjang masih perlu ditingkatkan.
- d. **Dimensi sikap profesional;** Sikap profesional aparatur desa mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Meskipun terdapat peningkatan kesadaran terhadap pentingnya tata kelola yang baik, budaya birokrasi tradisional masih menjadi tantangan dalam meningkatkan profesionalisme aparatur desa.

4.5. Analisis Spesifik Dampak Penguatan Kompetensi SDM terhadap Kualitas Administrasi Pembangunan Desa

Penguatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lokal dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Majalengka memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas administrasi pembangunan desa. Dampak tersebut dapat diamati secara spesifik pada beberapa aspek administrasi, yaitu perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, pelaporan kegiatan pembangunan, serta transparansi informasi publik kepada masyarakat.

Pada aspek perencanaan pembangunan desa, peningkatan kompetensi aparatur desa berkontribusi terhadap penyusunan dokumen perencanaan yang lebih sistematis, seperti Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Aparatur desa yang memiliki pemahaman administratif yang baik mampu menyusun prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat serta mempertimbangkan aspek keberlanjutan pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan prinsip administrasi pembangunan yang menekankan pentingnya perencanaan yang rasional dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Pada aspek pengelolaan keuangan desa, kompetensi aparatur desa dalam memahami regulasi dan sistem pelaporan keuangan menjadi faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana desa. Penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), misalnya, menuntut aparatur desa untuk memiliki keterampilan teknis dalam penginputan data keuangan, pengelolaan dokumen administrasi, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban. Desa yang memiliki aparatur dengan kompetensi digital yang

memadai cenderung memiliki tingkat kesalahan administrasi yang lebih rendah dan waktu pelaporan yang lebih tepat.

Selain itu, pada aspek transparansi dan akuntabilitas publik, penguatan kompetensi SDM juga berdampak pada meningkatnya kesadaran aparatur desa untuk menyampaikan informasi penggunaan dana desa kepada masyarakat secara terbuka. Transparansi ini diwujudkan melalui pemasangan papan informasi kegiatan pembangunan desa, publikasi laporan keuangan desa, serta pelibatan masyarakat dalam forum musyawarah desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi SDM tidak hanya berdampak pada aspek teknis administrasi, tetapi juga pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Secara keseluruhan, penguatan kompetensi SDM lokal terbukti menjadi faktor determinan dalam meningkatkan kualitas administrasi pembangunan desa di Kabupaten Majalengka. Tanpa dukungan aparatur desa yang kompeten, implementasi dana desa berpotensi mengalami berbagai kendala administratif yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan desa secara optimal.

5. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai administrasi pembangunan desa dan penguatan kompetensi sumber daya manusia lokal melalui program dana desa di Kabupaten Majalengka, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama. Pertama, implementasi administrasi pembangunan desa di Kabupaten Majalengka secara umum telah berjalan sesuai dengan mekanisme formal yang ditetapkan dalam regulasi, khususnya pada dimensi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan administrasi keuangan, serta pengawasan pembangunan. Pada dimensi perencanaan, proses Musyawarah Desa dan Musrenbangdes telah dilaksanakan secara partisipatif, namun kualitas perencanaan masih memerlukan penguatan terutama dalam penyusunan dokumen berbasis data dan analisis kebutuhan masyarakat. Pada dimensi pelaksanaan, pembangunan fisik desa telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat masih belum optimal. Sementara itu, pada dimensi pengelolaan administrasi keuangan, penggunaan sistem digital seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meskipun masih terdapat kendala dalam kemampuan teknis aparatur desa. Pada dimensi pengawasan, mekanisme kontrol telah berjalan, namun efektivitas pengawasan berbasis kualitas hasil pembangunan masih perlu ditingkatkan. Kedua, tingkat kompetensi sumber daya manusia lokal dalam mendukung pengelolaan dana desa di Kabupaten Majalengka menunjukkan adanya variasi kemampuan pada setiap dimensi kompetensi. Pada dimensi kompetensi administratif, sebagian aparatur desa masih mengalami keterbatasan dalam memahami regulasi dan prosedur administrasi yang kompleks. Pada dimensi kompetensi manajerial, kemampuan koordinasi dan pengambilan keputusan berbasis data masih perlu ditingkatkan. Pada dimensi kompetensi teknis keuangan, masih ditemukan keterbatasan dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Selain itu, pada dimensi literasi digital, kemampuan aparatur desa dalam mengoperasikan sistem berbasis teknologi masih belum merata, terutama di desa dengan keterbatasan infrastruktur teknologi. Ketiga, faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi administrasi pembangunan desa dan penguatan kompetensi SDM lokal meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kompleksitas regulasi pengelolaan dana desa, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, serta budaya birokrasi yang masih bersifat tradisional. Di sisi lain, faktor pendukung yang berperan penting meliputi adanya dukungan regulasi pemerintah, pendampingan teknis dari pemerintah daerah, penerapan sistem administrasi digital, serta

partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Keempat, upaya strategis yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan administrasi pembangunan desa melalui penguatan kompetensi sumber daya manusia lokal meliputi peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan berkelanjutan, penyederhanaan prosedur administrasi, penguatan sistem pengawasan berbasis kinerja, serta peningkatan literasi digital aparatur desa. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan dana desa perlu diarahkan secara seimbang antara pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat menciptakan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan administrasi pembangunan desa melalui program dana desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, tetapi sangat bergantung pada kualitas kompetensi sumber daya manusia lokal dan efektivitas tata kelola administrasi desa. Oleh karena itu, penguatan kompetensi aparatur desa secara sistematis dan berkelanjutan menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan desa yang transparan, akuntabel, efektif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2013). *Pembangunan perdesaan: Pendekatan partisipatif, tipologi, strategi, konsep desa pusat pertumbuhan*. Graha Ilmu.
- Ariani, A., & Gayatri, G. (2021). Good governance, kompetensi SDM, budaya organisasi dan kinerja pengelolaan dana desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(10), 2481–2495. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i10.p06>
- Azis, D. I., Roni, R., Nasiruddin, N., & Kharisma, A. S. (2024). Pengaruh kompetensi aparatur desa dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Brebes. *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies*, 7(2). <https://doi.org/10.33752/jfas.v7i2.9845>
- Dewi, R., & Hartono, S. (2023). Pengelolaan Dana Desa dan Tantangan Administrasi di Kabupaten Majalengka. *Jurnal Administrasi Pemerintahan*, 15(2), 134–149.
- Erawati, T., & Chridang, A. O. (2023). Hubungan kompetensi perangkat desa dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(10), 8195–8200. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i10.2056>
- Hasibuan, M. S. P. (2016). *Manajemen sumber daya manusia* (Edisi revisi). Bumi Aksara.
- Hidayani, R., Pratama, A., & Nugroho, D. (2023). Implementation of village financial systems (Siskeudes) to enhance accountability. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 8(2), 101–118.
- Hidayat, S., Warsono, H., & Nurtjahjanti, H. (2023). Towards a New Approach to Community-Based Rural Development: Lesson Learned from Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 9(2). <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311886.2023.2267741>.
- Kaho, J. R. (2012). *Prospek otonomi daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi beberapa faktor yang memengaruhi penyelenggaraannya*. Rajawali Pers.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang pengalokasian dana desa setiap desa, penyaluran, dan penggunaan dana desa tahun anggaran 2024*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. JDIH Kementerian Keuangan.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology (4th ed.)*. Sage Publications.
- Kusnandar, D., & Suryani, L. (2020). Administrative capacity and effectiveness of village fund management. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 12(1), 34–48.
- Larossa, C., Nurmala, N., & Anggraini, D. (2025). Pengaruh kompetensi, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi aparatur desa dan partisipasi masyarakat terhadap

- akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Journal of Authentic Research*.
<https://doi.org/10.36312/dbkfq86>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyani, S., Suharman, H., Winarningsih, S., & Sukmadilaga, C. (2018). Peran anggaran partisipatif, good village governance dalam meningkatkan pembangunan desa. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, 7(3).
<https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v7i3.19261>
- Ndraha, T. (2011). *Kybernology: Ilmu pemerintahan baru (Jilid 1)*. Rineka Cipta.
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162–172. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Putri, A., & Gunawan, B. (2025). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan kompetensi terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 9(3). <https://doi.org/10.18196/rabin.v9i3.30723>
- Putri, W. J., & Kusumawardani, A. (2024). Pengaruh kompetensi perangkat desa, transparansi, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, 8(1).
<https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.502>
- Rahmawati, R., Heriana, T., Sari, M. D., Dewi, S., & Almas, N. (2024). Akuntabilitas pengelolaan dana desa: Kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(1).
<https://doi.org/10.33395/jmp.v12i1.12881>
- Sedarmayanti. (2017). *Manajemen sumber daya manusia: Reformasi birokrasi dan manajemen pegawai negeri sipil (Edisi revisi)*. Refika Aditama.
- Siagian, S. P. (2014). *Filsafat administrasi*. Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. (2019). *Administrasi pembangunan: Konsep, dimensi, dan strateginya (Ed. 2)*. Bumi Aksara.
- Situngkir, A., & Simarmata, B. I. (2022). Pengaruh kompetensi aparatur desa, transparansi, dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan*, 5(2). <https://doi.org/10.51510/jakp.v5i2.987>
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhartini, A., Robiati, R., Hendri, Z., & Hendarsyah, D. (2021). Pengelolaan alokasi dana desa: Kompetensi aparatur desa, religiusitas dan pengawasan masyarakat. *Equity: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 24(2), 175–192.
<https://doi.org/10.34209/equ.v24i2.3699>
- Sulistyowati, A., & Elladevi, A. (2025). Pengaruh budaya organisasi, sistem pengendalian internal dan kompetensi aparatur desa terhadap kinerja pengelolaan dana desa. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing*, 21(2). <https://doi.org/10.37301/jkaa.v21i2.183>
- Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). *Competence at work: Models for superior performance*. John Wiley & Sons.
- Tjokroamidjojo, B. (1988). *Administrasi pembangunan*. LP3ES.
- Yuliana, N., Rahman, A., & Putra, D. (2021). Transparency and accountability of village fund management using digital systems. *Jurnal Keuangan Publik*, 6(2), 120–135.
- Yusnita, M., & Salfutra, R. D. (2021). Mengukur kinerja pengelolaan dana desa berbasis kompetensi melalui partisipasi sebagai variabel moderasi. *JRMSI - Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, 12(2). <https://doi.org/10.21009/JRMSI.012.2.05>
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.

